LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

TAHUN 2025

TRIWULAN I

LOTHARIA LATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabiltas dan transparansi kinerja Ditjen Perikanan Tangkap kepada instansi terkait dan publik sebagaimana berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara aktif mengawal implementasi kebijakan Ekonomi Biru, dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berfokus pada transformasi tata kelola perikanan berbasis keberlanjutan sumber daya alam, sesuai dengan potensi sumber daya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Program ini merupakan kontribusi nyata mewujudkan Asta Cita, yakni kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan nasional (swasembada pangan).

Kami mengapresiasi dukungan yang telah diberikan berbagai instansi, *stakeholders*, dan seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara modern, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kami mengharapkan tanggapan maupun saran yang membangun. Semoga melalui Laporan Kinerja ini, peran strategis seluruh jajaran serta stakeholders semakin meningkat untuk dapat mendukung kinerja pembangunan perikanan tangkap di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 24 April 2025
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Lotharia Latif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rencana kinerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja DJPT mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2025 DJPT menetapkan 4 (empat) Sasaran Program (SP) dengan 4 (empat) Indikator Kinerja tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna mencapai Sasaran Program yang diharapkan, DJPT melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, seluruh indikator kinerja telah dilakukan pengukuran. Berdasarkan pengukuran kinerja yang memanfaatkan aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Skor Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial pada triwulan I tahun 2025 adalah 109,24 atau masuk dalam kriteria Baik (hijau). Sebagian indikator kinerja yang harus diukur pada triwulan I tahun 2025 dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun dari sisi anggaran, berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan pada periode triwulan I tahun 2025 DJPT telah merealisasikan anggaran sebesar Rp92.003.904.271 atau 8,90% dari pagu sebesar Rp1,033 triliun. Dalam menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya inidikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada periode mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait serta stakeholder lainnya dilakukan dengan lebih intensif, mengingat terget indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh unit kerja lingkup DJPT. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup DJPT diharapkan dapat mendukung kinerja DJPT yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB 1. PENDAHULUAN		**1**
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA		**5**
2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	5
2.2	SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA	6
2.3	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	6
2.4	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA		**14**
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
	Sasaran Program (SP-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkat	15
	Sasaran Program (SP-2): Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	17
	Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	18
	Sasaran Program (SP-4): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	19
3.3	KINERJA ANGGARAN	21

BAB 4 PENUTUP **23**

LAMPIRAN **24**

DAFTAR TABEL

1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	9
2	Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2025	14
3	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” triwulan I tahun 2025	15
4	Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” triwulan I tahun 2025	17
5	Rencana Aksi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	18
6	Indikator Komposit Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT	20
7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan	21
8	Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja	21
9	Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan	22

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025	3
2	Dashboard Aplikasi Kinerjaku DJPT Triwulan I Tahun 2025	14
3	Grafik Pergerakan *Gap* It dan Ib	16

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang melimpah serta menjadi salah satu pilar dalam ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi ini menjadi salah satu modal utama untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu penguatan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan serta optimalisasi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan pendekatan ekonomi biru (blue economy). Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Platik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan program ekonomi biru yang diterapkan oleh KKP, DJPT mengampu salah satu program prioritas KKP yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem dan sumber daya ikan serta sekaligus mendorong peningkatan ekonomi di sektor kelautan perikanan dengan cara optimalisasi potensi perikanan nasional dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Kebijakan PIT juga merupakan suatu langkah nyata dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional berbasis maritim sebagaimana tertuang pada agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Selain dukungan terhadap program prioritas KKP, DJPT terus melaksanakan program strategis lainnya dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, peningkatan infrastruktur industri perikanan tangkap, produktivitas nelayan, serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap pada tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tetap menjunjung

aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja publik, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara berkala. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan serta merupakan instrumen evaluatif untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program di masa yang akan datang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta dipimpin oleh Direktur Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan

kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;

5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
5. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan; dan
6. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tergambar pada bagan di bawah ini:

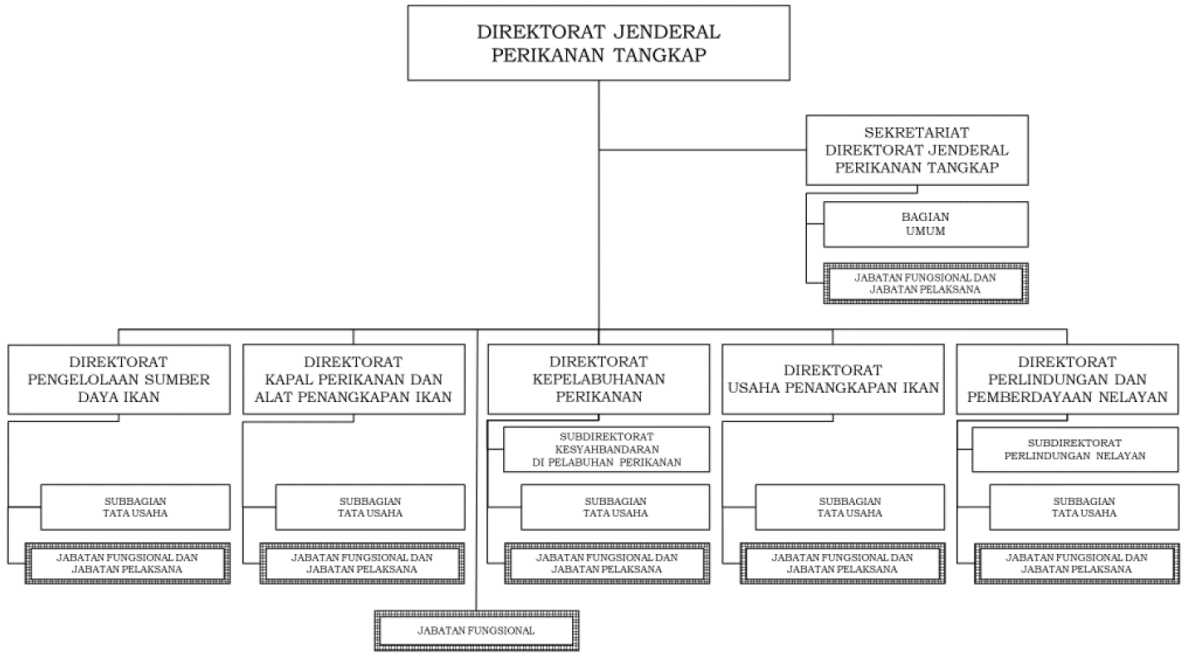

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta

kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

b. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

e. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

f. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Dirjen Perikanan dan Menteri Kelautan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
   a. Optimalisasi integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
   b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif; Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.

3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah **“Kesejahteraan Nelayan Meningkat”**, dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan;
2. Sasaran program kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”,** dengan indikator kinerja: Persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah **"Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap"**, dengan indikator kinerja: Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025, secara rinci sebagai berikut:

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan	Pihak Kesatu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono	**Lotharia Latif**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	80
4.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	4.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	725.993.588.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	17.550.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14.550.000.000
5	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	451.884.165.000
	Total Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025	**1.260.254.575.000**

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
Menteri Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono	**Lotharia Latif**

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
		Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan
		Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan
		Pelaksanaan penataan kampung nelayan (Kalaju)
		Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan (Kalaju)
		identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindunganya
		koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindunganya
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan
2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	Reviu kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan
		Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan
		Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan
		Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
		Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan
		Penyusunan/reviu pedoman penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Evaluasi pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan
		Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan
		Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dilakukan pengendalian pembangunan/ pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar
		Pelabuhan Perikanan yang dibina kegiatan kesyahbandarannya sesuai standar
		Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan
		Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
		Fasilitasi Pelatihan Bidang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
		Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya
		Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT
		Penyiapan Tenaga Pendataan dan penugasan dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi
		Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan
		Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan
		Penyusunan/Reviu Pedoman Penataan Perizinan untuk mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
		Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBP pascaproduksi
		Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
		Penerbitan izin usaha penangkapan ikan
		Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Analisis Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP)
		Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun
		Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penangkapan Ikan
		Optimalisasi Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis Sesuai Standar
		Optimalisasi Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis Sesuai Standar
		Penguatan Sistem Pendataan Pelabuhan Perikanan untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan
		Fasilitasi Tata Kelola Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kepatuhan
3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat
		Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem
		Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat
		Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol
		Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI
		Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional
		Sosialiasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO
		Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur
		Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah
		Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan
		Inisiasi dan koordinasi pembentukan lembaga penetapan lembaga pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat
		Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan
		Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan
		Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan
		Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI
		Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan
		Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur
		Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		Operasionalisasi LPPWPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan
		Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan
		Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan
		Penguatan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat untuk Kelestarian dan Optimalisasi Sumber Daya Ikan
4	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Penyusunan program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan dokumen perencaanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran
		Penyusunan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus sub bidang Perikanan Tangkap serta koordinasi lintas sektor
		Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Perencanaan dan penyelenggaran sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai
		Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
		Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP
		Ketatalaksanaan Organisasi
		Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi
		Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
		Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
		Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Kerjasama Internasional dan antar lembaga (Pemerintah dan non pemerintah) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT
		Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT
		Survey dan Analisis Kualitas Layanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
		Pendampingan Hukum
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
		Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan
		Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
		Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
		Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Integritas
		Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada triwulan I tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

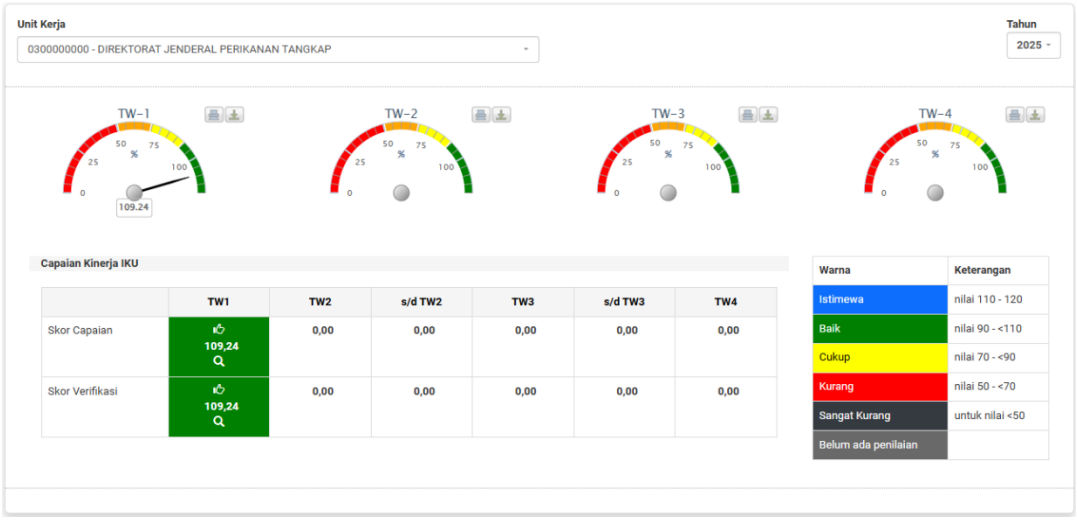

Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku DJPT Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja DJPT pada triwulan I tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 109,24. Meskipun demikian, masih terdapat IKU yang belum mencapai target, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN tidak tercapai karena sepanjang triwulan I tahun 2025 terjadi pergerakan harga komoditas perikanan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan berbagai harga komoditas lain yang dikonsumsi oleh Nelayan.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET PK 2025	TRIWULAN I TAHUN 2025		
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105	105	103,39	98,47
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19	1,41	1,70	120,57
3	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	80	Periode Pengukuran Tahunan		

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET PK 2025	TRIWULAN I TAHUN 2025		
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	4	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	Periode Pengukuran Tahunan		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Program (SP-1) : Kesejahteraan Nelayan Meningkat

Sasaran Program-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” triwulan I tahun 2025

SP 1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat											
IKU 1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
100,49	102,92	107,08	105,73	101,81	105	105	103,39	98,47	98,47	105	98,47

Selama triwulan I tahun 2025, NTN belum dapat mencapai target, namun nilai tertinggi NTN pada bulan Februari sebesar 103,80 dan terendah pada bulan Januari sebesar 102,87. Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024, realisasi triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,55%. Data sepanjang triwulan I tahun 2025 menunjukan harga jual ikan (tangkapan) yang diterima nelayan tidak mengalami lonjakan berarti, meskipun terdapat sedikit kenaikan dari Januari ke Maret. Selain itu terlihat biaya konsumsi rumah tangga dan produksi nelayan masih tinggi dan cenderung stabil, sehingga menggerus keuntungan atau daya beli nelayan. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2025 sebesar 105 posisi capaian triwulan I tahun 2025 sudah mencapai 98,47%. Berdasarkan wilayah administratif, NTN tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian

sebesar 127,39 dan NTN terendah berada di Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 110,7.

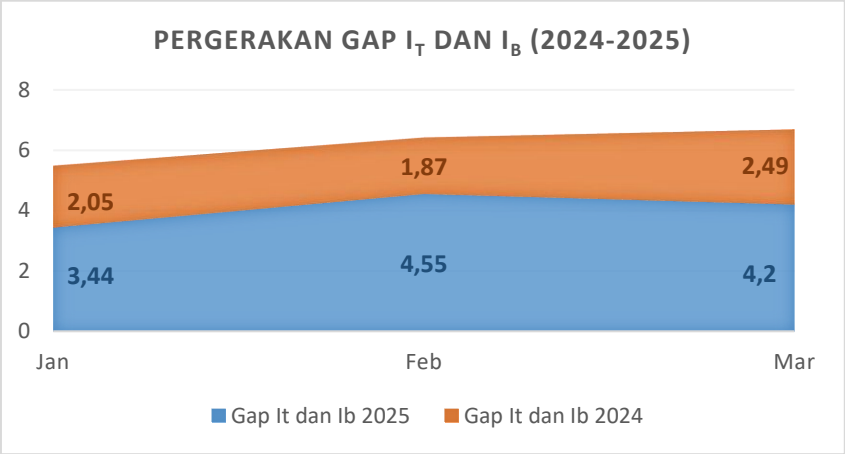

Gambar 3. *Grafik Pergerakan Gap I_t dan I_b*

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa *gap* antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (I_b) triwulan I tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan gap antara I_t dan I_b pada tahun 2024. Kemudian jika dilihat dari pergerakan, I_t dan I_b pada tahun 2025 semakin membesar di bandingkan dengan tahun 2024. Hal ini yang mengakibatkan nilai NTN triwulan I tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2024.

Kondisi NTN yang belum tercapai menggambarkan bahwa sepanjang triwulan I tahun 2025, I_t memperlihatkan adaya pertumbuhan namun tidak cukup tinggi (moderat) yang menunjukkan harga jual hasil tangkapan naik hanya sedikit. Untuk dapat mencapai target NTN sebesar 105 dibutuhkan pertumbuhan I_t yang lebih tinggi. Kemudian I_b pada triwulan ini tetap tinggi dan tidak memperlihatkan penurunan (sedikit naik). Biaya konsumsi rumah tangga, barang modal, dan kebutuhan produksi tetap tinggi sehingga mengakibatkan daya beli nelayan tergerus. Pada indeks penyusun Konsumsi Rumah Tangga, beberapa sektor mengalami kenaikan harga seperti Makanan, Minuman, dan Tembakau (128,96 ke 130,36), Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (96,72 ke 103,5) yang berakibat menahan laju kenaikan NTN.

Dalam mencapai NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung, seperti:

a. penyusunan rancangan peraturan tentang Nilai Acuan Ikan;
b. koordinasi dengan BPH Migas tekait sebaran SPBUN dan pengusulan kuota BBM 2025;
c. pengusulan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan;

Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, peningkatan SDM nelayan, serta optimalisasi peran BUMN/Koperasi untuk *offtaker* hasil tangkapan ikan nelayan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan biaya dilakukan melalui percepatan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan, akselerasi penerbitan rekomendasi pembangunan SPBUN, serta inventarisasi dan penyampaian data kebutuhan BBM kepada BPH Migas.

3.2.2. Sasaran Program (SP-2) : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan

Sasaran Program-2 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni volume produksi perikanan tangkap. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing.

Volume produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari volume produksi yang di daratkan di laut maupun perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota dengan menggunakan metode sampling. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP.

Tabel 4. Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” triwulan I tahun 2025

SP 2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan											
IKU 2	Volume Produksi Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024						Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
1,95	1,98	1,90	1,88	1,68	6,19	1,41	1,7	120,57	27,46	6,19	27,46

Volume produksi perikanan tangkap triwulan I tahun 2025 sebesar 1,70 juta ton atau mencapai 120,57% dari target triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 1,41 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 93% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 1,59 juta ton dan sisanya sebesar 7% atau 0,11 juta ton berasal dari perairan darat. Hal ini menunjukkan bahwa produksi triwulan I tahun 2025 telah mencapai target. Laporan produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan UPT pusat dan beberapa UPT daerah pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan peningkatan produksi sebesar 1,87 persen dibandingkan dengan produksi pada triwulan I tahun 2024 (*y on y*). Peningkatan produksi yang cukup signifikan di beberapa pelabuhan UPT Pusat antara lain PPN Tual, PPN Karangantu, PPN Kejawanan, PPS Bitung, PPN Pemangkat, PPN Brondong, PPS Bungus, dan PPS Nizam Zachman Jakarta.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target volume produksi perikanan tangkap diantaranya:

a. Kegiatan pendataan yang berbasis daerah penangkapan dengan penempatan enumerator pendataan ikan hasil tangkapan sebanyak 440 orang di 22 UPT Pelabuhan Perikanan dan 177 Pelabuhan Pangkalan;
b. Pengendalian hasil tangkapan dilakukan dengan pelaporan *Logbook* Penangkapan Ikan (LBPI). Pada triwulan I 2025, kapal perikanan yang telah melaporkan LBPI di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 8292 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 24.942 trip.

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu: 1) percepatan penyaluran bantuan pemerintah untuk

nelayan (alat tangkap dan mesin kapal); 2) Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan; 3) koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan; dan 4) mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.

3.2.3. Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Sasaran Program-3 “Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara terkendali, terukur, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan dititikberatkan untuk mencapai pemanfaatan yang berkelanjutan dan optimal, dengan menjaga kelestarian populasi ikan dan lingkungan perairan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini mencakup aspek biologis, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Indikator ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan, melalui pendekatan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan, sesuai dengan karakteristik masing-masing WPPNRI.

Pengukuran indikator kinerja ini didapatkan dari persentase pelaksanaan rencana aksi dalam kebijakan: a) pengelolaan perikanan perairan darat (15%); b) pengelolaan perikanan teritorial (20%); c) pengelolaan perikanan ZEEI dan laut lepas (20%); d) alokasi kuota sumber daya ikan (15%); e) *logbook* penangkapan ikan (15%); dan f) pemantauan di atas kapal perikanan (15%). Adapun rencana aksi dari pelaksanaan indikator kinerja persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rencana Aksi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Kegiatan	Kebijakan	Rencana Aksi
Pengelolaan SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan WPPNRI	Peraturan Menteri KP terkait RPP WPPNRI dan RPP jenis/kelompok jenis SDI	• Pelaksanaan pengelolaan SDI di laut territorial dan perairan kepulauan • Penyusunan *Harvest Strategy* • Pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan laut territorial dan perairan kepulauan

Kegiatan	Kebijakan	Rencana Aksi
Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas	Keputusan Menteri KP 121/2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	• Rekomendasi Pengelolaan SDI beruaya Jauh di forum regional • Pelaksanaan pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas
Pengelolaan Perikanan Perairan Darat	• Kepmen KP 118/2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat • Permen KP 9/2020 tentang WPPNRI di Perairan Darat	• Pengelolaan SDI di WPPNRI Perairan Darat • Penyusunan profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat
Log Book Penangkapan Ikan	Permen KP 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	Pelaksanaan *Log Book* Penangkapan Ikan
Alokasi Kuota Sumber Daya Ikan	Permen KP 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	• Penghitungan Alokasi Kuota SDI • Penyusunan Draft Kuota
Pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	Permen KP 33/2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan	• Penempatan Observer diatas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan • Hari Layar • Laporan Pemantauan

Capaian indikator kinerja persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan belum ada karena periode pengukuran dilakukan secara semesteran. Namun dalam upaya memenuhi target indikator kinerja ini, DJPT telah melaksanakan kegiatan:

a. penetapan Keputusan Dirjen PT Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
b. rekonsiliasi penerbitan Surat Keterangan Asal dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
c. koordinasi dengan BRIN terkait rencana pengelolaan perikanan, lembaga pengelolaan perikanan WPPNRI-PD, dan estimasi potensi SDI di Perairan Darat; dan
d. penyusunan rancangan pengelolaan perikanan Kepiting, Gurita, dan WPPNRI 572.

3.2.4. Sasaran Program (SP-4): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran Program-4 “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”, memiliki Indikator Kinerja Manajerial yakni Nilai Implementasi

Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Sasaran program ini bertujuan untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi *General* lingkup DJPT yang berasal dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Dalam mengukur kemajuan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diperlukan serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai yang disebut evaluasi reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap RB *General* adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Nilai indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa. Indikator komposit pembentuk nilai implementasi RB disusun dalam tabel berikut:

Tabel 6. Indikator Komposit Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT

Indikator Kinerja	Satuan	Bobot
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5
Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	10
Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5
Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	5
Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
IKPA Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	Indeks	10
Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	5
Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang Perikanan Tangkap	Persen	5
Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	5
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5
Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan. Namun dalam upaya memenuhi target indikator kinerja ini, DJPT telah melaksanakan kegiatan:

1. koordinasi dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II dan unit kerja lingkup DJPT dalam rangka pemantauan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sampai tuntas;
2. pengusulan calon unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ke Inspektorat Jenderal KKP;
3. koordinasi dengan Pusdatin KKP dalam upaya pengusulan proposal inovasi pelayanan publik tahun 2025;
4. penyusunan indikator kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
5. penyusunan rancangan Peraturan Menteri KP tentang Kesyahbandaran dan Keputusan Menteri KP tentang Kelas Pelabuhan Perikanan serta penyampaian Keputusan Menteri KP tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan ke Biro Hukum KKP;
6. penyelenggaraan bimbingan teknis Sistem Pelaporan SPIP Terintegrasi dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP lingkup DJPT ke Biro Keuangan dan Umum KKP; dan
7. penyusunan rancangan Keputusan Dirjen PT terkait Unit Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Agen Perubahan, Tim Pembangunan Zona Integritas.

3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.260.254.575.000,- atau naik 28% dari pagu alokasi anggaran tahun 2024. Namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka alokasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap terkena efisiensi menjadi Rp1.033.852.998.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp92.003.904.271atau mencapai 8,90%. Anggaran tersebut 63,09% digunakan untuk belanja pegawai; 36,43% untuk belanja barang; dan 0,48% untuk belanja program modal.

Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000	32.533.404.000	71.818.608	0,22
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	725.993.588.000	656.250.359.000	5.349.814.979	0,82
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	17.550.000.000	3.142.751.000	18.161.901	0,58
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14.550.000.000	3.233.465.000	778.723.408	24,08
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	451.884.165.000	338.693.019.000	85.785.385.375	25,33
TOTAL		**1.260.254.575.000**	**1.033.852.998.000**	**92.003.904.271**	**8,90**

Tabel 8. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	206.783.053.000	206.783.053.000	58.043.331.740	28,07
2	Belanja Barang	500.613.782.000	303.794.814.000	33.519.115.126	11,03

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
3	Belanja Modal	552.857.740.000	523.275.131.000	441.457.405	0,08
TOTAL		**1.260.254.575.000**	**1.033.852.998.000**	**92.003.904.271**	**8,90**

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja, realisasi triwulan I tahun 2025 hampir sama dengan realisasi triwulan I tahun 2024 yakni belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun modal. Belanja pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan secara rutin.

Tabel 9. Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pusat	397.304.639.000	265.402.136.000	24.089.887.439	9,08
2	UPT	850.491.092.000	768.286.562.000	67.860.452.216	8,83
3	Tugas Pembantuan	12.458.844.000	164.300.000	53.564.616	32,60
TOTAL		**1.260.254.575.000**	**1.033.852.998.000**	**92.003.904.271**	**8,90**

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode triwulan I tahun 2025 realisasi tertinggi adalah pada kewenangan Tugas Pembantuan, sedangkan yang realisasi terendah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini disebabkan pada triwulan I, realisasi masih terbilang cukup rendah dikarenakan masih ada penyesuaian anggaran pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon eselon I dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT, dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) DJPT triwulan I tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) selama triwulan I tahun 2025. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta pembandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Pada tahun triwulan I tahun 2025, rata-rata pencapaian sasaran strategis DJPT adalah sebesar 109,24% (bernilai baik). Berdasarkan target pada rencana aksi Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025, dari total 4 Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya belum 100%, yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian sebesar 103,39 NTN tidak tercapai karena sepanjang triwulan I tahun 2025 menunjukan harga jual ikan (tangkapan) yang diterima nelayan tidak mengalami lonjakan berarti meskipun terdapat sedikit kenaikan dari Januari ke Maret, sedangkan biaya konsumsi rumah tangga dan produksi nelayan masih tinggi dan cenderung stabil, sehingga menggerus keuntungan atau daya beli nelayan. Namun indikator kinerja lain, yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan pencapaian yang Sangat Baik, dibuktikan dengan capaian triwulan I mencapai 1,70 juta ton atau 120,57% dari target triwulan I (1,41 juta ton).

Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp92.003.904.271 dari total pagu Rp1,033 triliun. Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diperlukan beberapa rencana aksi:

- Melakukan verifikasi capaian kinerja secara berkala untuk seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap baik di Pusat maupun UPT; dan
- Memaksimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan strategis agar penyerapan anggaran triwulan II lebih meningkat.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan	Pihak Kesatu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono	**Lotharia Latif**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	80
4.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	4.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Data Anggaran :

	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	725.993.588.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	17.550.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14.550.000.000
5	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	451.884.165.000
	Total Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025	**1.260.254.575.000**

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
Menteri Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono	**Lotharia Latif**